

Edisi September 2014

# REFUGE

Jesuit Refugee Service Indonesia  
Menemani, Melayani dan Membela Hak-hak Para Pengungsi

*Sebuah Kesempatan  
Melihat Dunia*

---

*Pengungsi Anak-anak  
Memiliki Hak atas Perlindungan*

---

*Harapan yang Tersisa*

---

*Foto untuk Mengundang  
Keterlibatan*

---



# Sebuah Kesempatan Melihat Dunia

Daryadi Achmadi



Aktivitas berenang menjadi salah satu cara untuk mengurangi kejenuhan para deteni

Kehidupan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) bagi para pencari suaka adalah sebuah penantian panjang. Mereka harus menunggu proses Penentuan Status Pengungsi dan sesudahnya masih harus menunggu proses untuk ditempatkan di negara ketiga. Penantian yang panjang dan kehidupan sehari-hari yang monoton seringkali membuat mereka merasa stres, jenuh dan bosan.

Proses penentuan status itu biasanya membutuhkan waktu delapan bulan sampai satu tahun. Para deteni sering memplesetkan istilah *Immigration Detention Center* (Rudenim) menjadi *Immigration Tension Center* untuk menggambarkan suasana yang penuh ketidakpastian dan menimbulkan stres (*tension*) tersebut. Jika pengajuan statusnya sebagai Pengungsi ditolak oleh UNHCR, maka diperlukan waktu lebih lama lagi untuk tinggal di Rudenim.

Ketika JRS menawarkan kegiatan berenang dan menikmati suasana di luar Rudenim, para deteni menyambutnya dengan antusias. Pihak Rudenim juga menyambutnya dengan terbuka, karena kegiatan ini dapat membuat para deteni merasa lebih gembira. Kegiatan berenang ini berlangsung setiap Rabu, di sebuah kolam renang yang berjarak sekitar 12 km dari Rudenim. Sepuluh

orang deteni secara bergiliran mengikuti kegiatan ini setiap minggunya. Sejak pertengahan Maret 2014 sampai Agustus 2014 hampir semua deteni sudah pernah mengikutinya, bahkan ada yang ikut 2 kali. Kegiatan renang ini difasilitasi oleh IOM dan JRS dengan melibatkan 20 orang staf Rudenim yang bertugas menjaga.

“Saya sangat senang dengan kegiatan ini. Saya bisa melihat dunia luar dan mengurangi rasa bosan tinggal berbulan-bulan di Rumah Detensi Imigrasi,” kata deteni asal Somalia yang telah mendapat status Pengungsi.

“Paling tidak, saya bisa keluar. Saya bisa berenang dan menikmati suasana di luar Rudenim. Saya juga bisa membeli sesuatu untuk teman-teman saya. JRS menyelenggarakan semua ini,” kata deteni asal Somalia.

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim menyatakan, “Dengan kegiatan berenang, paling tidak mereka bisa bergembira sekaligus berolahraga. Dengan demikian rasa jenuh dan bosan para deteni bisa berkurang.” Bahkan ia menambahkan, “Kalau memungkinkan sebenarnya saya setuju jika kegiatan semacam ini frekuensinya ditambah, bisa dua kali dalam seminggu.”

Dukungan senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Keperawatan Rudenim yang mengatakan, "Yang penting deteni bisa senang dan ceria, sehingga tidak terlalu banyak mengeluh dan merasa stres. Jika merasa senang dan tidak stres, para deteni bisa lebih sehat."

Mereka sering menanyakan kapan giliran mereka untuk berenang. Menurut pencari suaka asal Afghanistan, kegiatan berenang dapat

mengurangi stres, meski harus menunggu dua bulan lebih untuk mendapatkan giliran.

Meskipun sederhana, kegiatan berenang merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak Pengungsi akan kebebasan sehingga mereka dapat melihat dunia yang lebih luas dan menikmati kegembiraan yang pada umumnya dapat kita nikmati dengan mudah.\*\*\*

## Pengungsi Anak-anak Memiliki Hak atas Perlindungan

*Vembri Turanto*

"Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu.. Demi satu impian yang kerap mengganggu tidurmu... Anak sekecil itu tak sempat menikmati waktu... Dipaksa pecahkan karang, lemas jarimu terkepal.."

Lirik lagu Iwan Fals berjudul "Sore Tugu Pancoran" itu terlintas saat saya sampai di rumah setelah mengunjungi salah satu keluarga Sri Lanka yang tinggal di sebuah rumah sewa di pinggiran Jakarta. Harshan Chandra tinggal bersama istri dan dua anaknya. Sudah hampir satu setengah tahun mereka sekeluarga tinggal di Indonesia. Mereka menempuh perjalanan yang melelahkan dengan perahu dari Sri Lanka, melalui Malaysia, hingga akhirnya tiba di Indonesia.

Anak perempuannya bernama Chandrika. Usianya 12 tahun. Ia adalah anak pertama. Chandrika adalah salah satu dari sekian banyak anak yang tidak dapat merasakan kegembiraan dan keceriaan bermain serta belajar di sebuah sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Di usianya yang sekarang ini, ia dan adiknya sudah harus ikut mengungsi bersama orangtuanya demi mendapatkan hidup yang lebih aman dan damai.

Perjalanan yang dilaluinya, barangkali sebuah perjalanan yang tak pernah terduga dan terbayangkan sebelumnya. Sebagai anak-anak, perjalanan yang dibayangkannya adalah perjalanan liburan naik perahu yang menyenangkan dan penuh petualangan. Ternyata, perjalanan itu adalah perjalanan pengungsian yang melelahkan, penuh



Pengungsi anak sedang belajar melukis

resiko dan bahaya, mengancam keselamatan, dan kehabisan bekal makanan maupun uang untuk bertahan hidup.

Awalnya, keluarga ini sangat ragu-ragu menerima kedatangan saya di rumah kontrakannya. Kami memang belum pernah bertemu. Setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan obat yang saya bawa untuk sang ayah, raut muka Chandrika berubah senang, "Oh ya, *medicine for father. Thank you Sir.*" Suasana segera berubah menjadi cair. Harshan Chandra mempersilakan saya untuk masuk dan duduk, sambil menunggu sang istri membuat minuman.

Harshan Chandra menderita penyakit jantung dan asma. JRS membantu menyediakan obat yang dibutuhkannya. Setiap bulan, JRS mengantarkan obat ke rumah kontrakannya. Para Pencari Suaka dan Pengungsi yang rentan tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk anak-anak seperti Chandrika, JRS menyelenggarakan kelas bahasa Inggris di mana mereka dapat belajar dan bermain bersama dengan teman sebaya. Ini merupakan salah satu cara membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang terpaksa mengungsi bersama orangtua mereka.

Chandrika sangat senang dan aktif mengikuti

kegiatan belajar bahasa Inggris. Karena itu, ia sering membantu menjadi penerjemah dalam percakapan dengan orangtuanya. Sesekali ia juga bisa berbicara dalam bahasa Indonesia.

“Selain bahasa Inggris, Chandrika juga belajar bahasa Indonesia?” tanya saya kepadanya. “Ya saya bisa bicara Indonesia sedikit. Saya senang bisa belajar dengan teman-teman,” jawabnya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. “*You also stay in Bogor Sir?*” sambungnya. “*No, I stay in Jogja, another place in Indonesia,*” jawab saya. “Oh okey. Jogja jauh dari Bogor?” tanyanya lagi. “Iya, naik kereta api atau bus sekitar sepuluh jam. *It is about ten hours by train or bus,*” jawab saya. “*Wow, ten hours is very far Sir,*” katanya sambil mengangguk. Tidak lama kemudian ibunya datang dengan membawa segelas kopi. Dengan sopan ia mempersilakan, “*Please Sir, minum coffe,*” sambil menunjuk segelas kopi yang sudah tersaji di meja.

Chandrika adalah salah satu dari sekitar 2.652

Pengungsi dan Pencari Suaka anak-anak di Indonesia. 908 di antaranya merupakan anak-anak tanpa pendamping atau yang terpisah dari keluarganya. Mereka terpaksa terusir dari negerinya sendiri. Di sini, mereka kehilangan hak untuk menikmati pendidikan. Sewaktu-waktu mereka dapat ditangkap dan dikurung di dalam Rumah Detensi Imigrasi yang sangat tidak cocok bagi kehidupan anak-anak. Anak-anak ini rentan untuk disalahpahami sehingga seringkali tidak mendapatkan bantuan serta perlindungan.

Anak-anak ini sekarang hadir di tengah kita. Mereka mungkin masih akan menghadapi perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak-anak yang terpaksa mengungsi, memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan agar mereka tetap memiliki masa depan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disepakati oleh PBB pada tanggal 20 November 1989.



Pencari Suaka sedang mendengarkan informasi tentang proses Penentuan Status Pengungsi

## Harapan yang Tersisa

*Gading Gumilang Putra*

Di Afghanistan, penganiayaan tidak hanya terjadi sebatas perbedaan agama. Perbedaan suku hingga perebutan lahan juga dapat menjadi alasan untuk bertengkar. “Saya datang ke Indonesia pada bulan Agustus 2013. Sudah satu tahun saya tinggal di Indonesia. Istri saya sekarang hamil 6 bulan untuk anak pertama kami,” Mustafa berkata sambil berkaca-kaca. Istrinya, Fatimah, hanya tersenyum tegar menanggapi suaminya.

Sore itu, JRS menemui keluarga Mustafa di Bogor untuk pelayanan RSD (*Refugee Status Determination*). “Dalam tiga hari, kami akan *interview* dengan UNHCR. Kami tidak memahami prosesnya, dan khawatir. Kami sudah terlalu lama menunggu. Kami sangat senang JRS meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih,” kata Mustafa ketika JRS datang. Mustafa bersama istrinya, Fatimah dan adik iparnya, Hamid.

“Saya tidak tahu harus mulai dari mana,” kata Mustafa dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Ia mengungsi dari Afghanistan sejak usia 8 tahun. Bersama orangtuanya, dia pergi ke Iran karena perang saudara di Afghanistan. Setelah hidup dalam pengungsian selama 25 tahun di Iran, Mustafa dan keluarganya dideportasi oleh pemerintah Iran karena dianggap ilegal.

Setelah pulang ke Afghanistan, masalah justru bertambah. “Oleh warga kampung, saya dipaksa untuk berperang melawan kelompok bersenjata. Kelompok itu menginginkan lahan kami. Setiap malam kami mendengar suara senjata. Padahal saya tidak suka berperang,” keluh Mustafa. Tak kuasa menahan beban dan rasa takut, Mustafa meninggalkan rumah satu-satunya yang tersisa di Afghanistan. “Hanya dalam waktu satu minggu, kami berlima akhirnya memutuskan pergi. Saya, istri, adik ipar, dan kedua mertua saya. Saya tidak mau memegang senjata dan kami semua takut.”

Di tengah jalan, bus umum yang dikendarainya dihentikan oleh kelompok bersenjata. Setiap laki-laki dari warga kampung Mustafa dipaksa turun dan ditodong senjata. Mustafa harus terpisah dari istri dan ibu mertuanya. Bersama dengan Hamid dan ayah mertuanya, Mustafa harus pasrah untuk dipaksa turun, dipukuli, dan akhirnya ditahan.

“Suatu malam, kami merasa tidak ada orang yang menjaga. Berbekal nekat, kami semua keluar dari jendela dan melarikan diri,” ucap Mustafa sembari tersenyum. Namun buru-buru senyum tersebut kembali hilang. “Tapi ayah ipar saya hilang di tengah hutan saat kami lari. Kami terpisah, dan belum pernah melihatnya lagi hingga saat ini,” tutur Mustafa lirih sembari memandang istrinya.

“Ibu kami juga tidak dapat berada di sini bersama kami,” tambah Fatimah. Setelah peristiwa itu, keluarga Mustafa memutuskan untuk mengungsi ke Pakistan. Di Pakistan mereka bertemu dengan agen penyelundup manusia (*people smuggler*). Agen tersebut menjanjikan keluarga Mustafa untuk sampai di Australia dengan perahu (*boat*), namun ibunya harus berangkat terakhir. Merasa tak memiliki pegangan, keluarga Mustafa memutuskan untuk mengikuti saran agen tersebut dan memberikan seluruh uang tabungannya. “Hingga kini, agen tersebut tidak dapat kami hubungi. *Boat* ke Australia tidak lagi tersedia dan Ibu kami tidak pernah diberangkatkan dari Pakistan,” Mustafa bertutur

sembari menundukkan kepalanya. Fatimah menggenggam tangan suaminya erat.

“Proses RSD UNHCR adalah satu-satunya harapan kami yang tersisa. Karena itu kami sangat berterima kasih JRS bersedia hadir di sini,” kata Fatimah. Kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan harta memberikan tekanan batin yang besar bagi keluarga Mustafa. “Saya tidak menyangka perjalanan kami akan seperti ini. Tapi kami berusaha sabar. Paling tidak kami bertiga masih diizinkan untuk bisa bersama-sama.”

Ditanya mengenai kondisi kandungannya, Fatimah lagi-lagi hanya dapat tersenyum. “Insha Allah, baik. Saya tidak tahu pasti, selama enam bulan, kami baru diperiksa dokter satu kali di bulan ketiga.” Mustafa dengan suara sangat lirih menyebutkan bahwa keluarganya sudah mengalami permasalahan keuangan karena Indonesia tidak mengizinkan pencari suaka untuk bekerja. “Kami memutuskan untuk pindah ke Jakarta demi mendapatkan bantuan keuangan. Mudah-mudahan berhasil, setidaknya untuk bayi kami. Kami juga bersyukur mendapatkan harga sewa rumah yang lebih murah.” Fatimah mencoba menghibur suaminya, “Seandainya saja, kamu bisa kembali menjahit seperti dulu ya?” Kali ini giliran Mustafa yang menatap istrinya dan tersenyum.

“Kini saya sudah memahami tentang proses UNHCR. Saya juga merasa siap untuk wawancara. Tolong jangan lupakan kami ya, setidaknya sebagai teman,” pesan Mustafa kepada JRS ketika kami hendak berpisah.

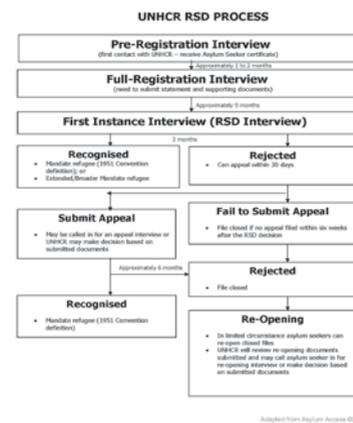


Diagram tentang proses Penentuan Status Pengungsi

# Foto untuk Mengundang Keterlibatan

*Indro Suprobo*



Seorang Pengunjung sedang mengamati foto-foto karya Greg Constantine di Jogja Gallery

“Rohingya adalah persoalan tentang negara, kemanusiaan dan demokrasi. Greg Constantine telah memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pesan lebih mendalam tentang kemanusiaan. Karya fotografi Greg Constantine merupakan gerbang bagi masyarakat Indonesia untuk menyadari persoalan ketidakadilan di Indonesia melalui persoalan ketidakadilan di dunia, yakni Rohingya,” kata Alissa Wahid, ketika membuka pameran foto “Exiled to Nowhere: Burma’s Rohingya” di Jogja Gallery pada Sabtu petang, 23 Agustus 2014.

Pameran fotografi yang berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 30 Agustus 2014 ini, diperkaya dengan kegiatan diskusi dan seminar yang diselenggarakan dalam kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pusat Studi ASEAN Universitas Gadjah Mada, dan Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Diskusi juga diselenggarakan melalui siaran langsung di Radio Republik Indonesia dan Radio Sonora Yogyakarta. Perbincangan khusus tentang seni fotografi diselenggarakan di Jogja Gallery dalam kerjasama dengan Kelas Pagi Yogyakarta.

“Fotografi dan Pameran hanyalah merupakan jalan untuk dapat mendiskusikan persoalan orang Rohingya secara lebih detail dan luas karena persoalannya menyangkut hak asasi manusia, identitas, hukum internasional, pengungsian dan sebagainya. Apabila pameran ini dapat membawa perubahan bagi situasi Rohingya, ini merupakan hal yang luar biasa. Kisah tentang pelanggaran hak asasi manusia terjadi di mana-mana sehingga pameran fotografi menjadi salah satu cara untuk mengangkat situasi yang sangat memprihatinkan itu. Akibatnya, pameran ini bukanlah soal fotografi melainkan soal keterlibatan,” kata Greg Constantine.

Situasi tanpa kewarganegaraan seperti dialami oleh orang Rohingya adalah kondisi bahwa orang tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah negara manapun. Akibatnya, ia tidak memiliki kartu tanda penduduk, paspor, akta kelahiran, tidak punya akses pada pelayanan publik, dan kehilangan hak-hak dasarnya. Ada kurang lebih satu juta orang Rohingya yang tak memiliki kewarganegaraan dan mengalami keadaan yang paling buruk di seluruh dunia. Situasi orang Rohingya mewakili persoalan kemanusiaan di seluruh dunia, yakni diskriminasi dan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap warga negara sendiri. Persoalan tentang kewarganegaraan



Greg Constantine, Lars Stenger dan G. Sri Nurhartanto memfasilitasi Seminar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

semestinya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap hak-hak dasar yang melekat pada diri seorang manusia.

Di Myanmar, orang Rohingya tidak termasuk dalam 135 etnis nasional yang diakui sebagai warga negara. Mereka menghadapi kontrol yang sangat ketat oleh pemerintah. Kesulitan yang mereka alami misalnya berupa manipulasi dan pemerasan untuk mendapatkan izin menikah, ancaman hukuman dan pemenjaraan, perampasan tanah dan harta benda, kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan, serta ancaman kerja paksa. Kaum perempuan Rohingya seringkali mengalami penganiayaan dan pelecehan yang sangat tidak manusiawi. Situasi seperti ini memaksa mereka untuk mengungsi ke negeri-negeri tetangga, termasuk ke Indonesia.

Ketika mengungsi, mereka rentan mengalami pelecehan dan kekerasan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dan seringkali akses mereka pada bantuan kemanusiaan dihambat. Mereka menghadapi penolakan dan hampir tak satu pun negara mau menerima mereka sebagai warga negara.

Pada tahun 2014 ini, jumlah orang Rohingya di Indonesia mencapai 863 orang dengan status pengungsi dan 76 orang dengan status pencari suaka. Di Indonesia, mereka pun tidak dapat bekerja secara formal untuk menghidupi diri

dan keluarga. Mereka juga belum memiliki solusi berdaya tahan untuk memutuskan pengungsian mereka, baik berupa integrasi ke dalam masyarakat Indonesia maupun penempatan ke negara ketiga. Ratusan orang di antara mereka ditahan di Rumah-rumah Detensi Imigrasi, termasuk perempuan dan anak-anak. Kondisi mereka tetap memprihatinkan.

“Meskipun tidak meratifikasi konvensi pengungsi, setiap negara termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi lintas batas. Ini merupakan prinsip standar dalam hukum internasional dan standar humanitarian. Pemerintah Indonesia juga wajib menghormati prinsip ‘non refoulement’, yakni tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal yang masih tidak aman,” kata Gregorius Sri Nurhartanto, dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Situasi tanpa kewarganegaraan dan pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan perhatian besar dari komunitas internasional. Diperlukan perumusan mekanisme hukum agar negara-negara dapat membantu orang tanpa kewarganegaraan di berbagai tempat.

“Komunitas tanpa kewarganegaraan sudah tidak relevan di dunia yang mengagungkan kemanusiaan saat ini. Desak ASEAN untuk menciptakan kebijakan perlindungan bagi mereka,” tulis



Alissa Wahid dan Greg Constantine dalam pembukaan Pameran

seorang pengunjung pameran bernama Zulkhan dalam buku kesan dan pesan.

Dalam konteks ASEAN, Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengusulkan dua jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus Rohingya, yakni melalui *ASEAN Way* yang fleksible dan konstruktif atau melalui mekanisme *Responsibility to Protect*. Melalui *ASEAN Way*, negara-negara ASEAN dapat melakukan diplomasi kemanusiaan terhadap pemerintah Myanmar dan mendorong mereka untuk mengamandemen Undang-undang Kewarganegaraan mereka yang diskriminatif dan menimbulkan persoalan kemanusiaan. Melalui mekanisme *Responsibility to Protect*, negara lain dapat memberikan perlindungan atas dasar kemanusiaan ketika sebuah negara tidak berkehendak untuk melindungi manusia yang berada di dalam wilayah kedaulatannya dan justru melanggar hak asasi mereka.

Bagi masyarakat Indonesia, terlibat secara serius dalam mengatasi situasi tanpa kewarganegaraan merupakan hal yang mendesak dan penting. Indonesia perlu mencari upaya hukum, sosial, ekonomi, kultural dan kemanusiaan agar dapat membantu orang tanpa kewarganegaraan yang berada di dalam wilayahnya. \*\*\*

## EDITORIAL

### Penanggungjawab Redaksi

Th. A. Maswan Susinto, SJ

### Editor

Lars Stenger  
Indro Suprobo

### Penulis Artikel

Daryadi Achmadi  
Vembri Turanto  
Gading Gumilang Putra  
Indro Suprobo

### Penerjemah

Indro Suprobo  
Lars Stenger

## JESUIT REFUGEE SERVICE INDONESIA

Gg. Cabe DP III No.9  
Puren, Pringwulung, Condong Catur  
Depok, Sleman  
Yogyakarta 55283  
INDONESIA

Phone/Fax: +62 274 517405  
email: indonesia@jrs.or.id  
website: www.jrs.or.id

Kirimkan kritik dan saran Anda  
ke Redaksi Refuge  
refuge@jrs.or.id



Kebutuhan yang harus ditanggapi semakin besar.  
Jika Anda tergerak mendukung pelayanan kami,  
Anda dapat memberikan donasi melalui

Nama Bank: BCA (Bank Central Asia)  
Alamat Bank: Jl. Jend. Sudirman Yogyakarta Indonesia  
Rekening Atas Nama: **Yayasan JRS Indonesia**  
Tipe Rekening: Tahapan  
Nomor Rekening: **037 333 2001**  
Kode Bank (Jika diperlukan): #CENAIJJA#

Terimakasih atas dukungan Anda  
untuk membantu Pengungsi di Indonesia